

KEBIJAKAN ADAPTIF-STRATEGIK INDONESIA TERHADAP CHINA DALAM KASUS SUKU UIGHUR DI XINJIANG (2014–2019)

Oleh: Dyah Purbo Arum Larasati

dyahpurboarum@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Mhd. Saeri., M.Hum

Bibliografi: 28 Buku, 10 Jurnal, 70 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru, 28293

Telp/Fax 07561-63277

Abstract

This research aims to find out the reason about why Indonesia government has not yet elevate their political pressure (act) to China in the case of Uyghur ethnic cleansing in Xinjiang. This is unique for sure pondering that Indonesia quite being active in criticize the Israel colonialism towards Palestine, but nothing for Uyghur, or here is means getting stagnancy. Even on the one side, the Israel–Palestine conflict is about colonialism, but it also same towards Uyghur case that need the acknowledgment of human rights. The Uyghur conflict which absolutely can be seen by the news scattered in the international media, said that millions Uyghur have been detained in camps build by the Chinese government in Xinjiang province.

Xinjiang itself has been known as the strategic location and rich by its oil, while Uyghur is an ethnic that origins from Proto–Turkey, they dwelled the autonomous region of Xinjiang in the Middle Asia. Uyghur have some similarities in history, culture, and religion with Turkey, also often mentioned having clash with Han as the majority ethnic in China.

The Uyghur case has been un–directly summoning Indonesia citizen's sympathy, notably those in the religious groups who demand the Indonesia government to take the strict pressure towards China. Their demands explained side by side against the other religious groups, include those commonly looks as nationalist in the government level, which further this intended to illustrate the most dominant influence in Indonesia's foreign policy.

This research uses the perspective of behavioralism which is intended to depict the situation of Indonesia's foreign policy made by a group of decision makers which is further the product of policy itself would be based the thought of those decision makers. This research also uses the theory of adaptive–strategic foreign policy, intended to create a balance either the external or the internal pressure that Indonesia has been facing since this issue was emerged. The other relatable stuff also comes from the usage of the analysis level of group, which this one used to explain the situation and the strategic decision ignited as a product of Indonesia's foreign policy, made based the consideration of group in the government level. Furthermore, this research uses the qualitative method, characterized by collecting and analyzing data from books, journals, articles, and news that come from various media.

Keywords: foreign policy, human rights, Uyghur, Xinjiang, China, Indonesia

PENDAHULUAN

Isu investasi yang juga disebut dengan OBOR (*One Belt One Road*) atau BRI (*Belt Road Initiative*) China bertujuan untuk menghubungkan negara-negara di berbagai benua untuk membantu perdagangan internasional, yaitu dengan China sebagai pusatnya. Bahkan, pada Sabtu, 27 April 2019 Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara juga turut mengalami hari yang bersejarah, yaitu penandatanganan 23 kesepakatan kerjasama dalam acara KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Kedua BRI di Beijing, China.¹

Pengamat menyebutkan perihal paranoia atau kekhawatiran akan timbulnya hutang dari penandatanganan proyek BRI ini, yaitu seperti Sri Lanka yang pernah mengalami kasus gagal bayar dalam BRI sehingga Sri Lanka harus melepas 70% saham pelabuhan Hambatota kepada BUMN China. Namun sayangnya, hal tersebut tidak menjadi rintangan bagi Indonesia untuk membatalkan investasi tersebut, dan sebaliknya tetap melanjutkan kerjasama perdagangan dengan BRI China.² Lebih lanjut, berdasarkan berita dari Wartaekonomi.co.id yang mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yaitu diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada Januari 2020, bahwa China berada pada posisi ketujuh, yaitu setelah Amerika Serikat, Singapura, Australia, Jepang, Jerman, dan Prancis.³

Portal resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tanggal 21 September

2019 bahkan juga ikut menyebutkan, bahwa eratnya kemitraan strategis Indonesia bersama China semakin meningkat, yaitu dengan tercatatnya nilai perdagangan dua arah pada tahun 2018 senilai \$72,67 miliar, yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2012, serta mengalami kenaikan sebesar 23,48% dari total perdagangan 2017 yang hanya sebesar \$58,84 miliar. Selain itu, dengan ditanda-tanganinya *MoU on Jointly Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Belt and Road Initiative* pada Oktober 2018 juga turut menguatkan kemitraan strategis tersebut.⁴

Pertemuan bilateral antara presiden Joko Widodo dan Xi Jinping beberapa waktu lalu di Osaka, Jepang juga dilanjutkan oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita yang kemudian bertemu dengan *Minister of General Administration of Custom China* (GACC) pada 29 Juli 2019, yaitu untuk membahas harapan Indonesia kepada China agar memberi kemudahan bagi sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti sarang burung walet, aneka buah-buahan tropis, serta produk perikanan. Pihak Indonesia juga mengusulkan pembentukan *joint working group* untuk mempercepat proses kerjasama ekspor tersebut, serta mengajak para importir sarang burung walet China untuk mau berinvestasi di Indonesia.⁵

China yang mendapatkan catatan gemilangnya dalam berbagai proyek dan

¹ Tirto.id, *Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Hutang*, <https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspada-jebakan-hutang-dnpo#> Diakses pada 26 November 2019 pukul 21.25 WIB

² *Ibid.*

³ Wartaekonomi.co.id, *Siapa Negara Pemberi Utang ke Indonesia? No 1 Bukan China*, <https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita/274972/siapa-negara-pemberi-utang-ke-indonesia-no-1-bukan-china> Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 22.50 WIB

⁴ Kementerian Luar Negeri Indonesia: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia, *Eratnya Kemitraan Strategis RI-RRT dalam Pesona Wonderful Indonesia*, <https://kemlu.go.id/beijing/id/news/2128/eratnya-kemitraan-strategis-ri-rrt-dalam-pesona-wonderful-indonesia> Diakses pada 26 November 2019 pukul 09.05 WIB

⁵ Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Terobosan Kreatif dan Strategis Untuk Tingkatkan Ekspor Indonesia ke Tiongkok*, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/494/berita/terobosan-kreatif-dan-strategis-untuk-tingkatkan-ekspor-indonesia-ke-tiongkok> Diakses pada 26 November 2019 pukul 09.06 WIB

investasi ini ternyata belum cukup puas dalam meletakkan pengaruhnya di dunia internasional, sebab sikap China yang menolak hasil arbitrase internasional pada tahun 2016 memang telah mempengaruhi dinamika politik situasi di Laut China Selatan, terutama setelah China berani menempatkan skuadron pesawat tempur di pulau-pulau artifisial, menyusul instalasi rudal nuklir jarak sedang dan jarak jauh.⁶ Sifat hegemoni yang mulai ditunjukkan China semakin tampak ketika Indonesia meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara yang mana hal tersebut membuat China marah. Perubahan nama terhadap laut yang kaya akan minyak, gas, dan mineral itu juga pernah dilakukan oleh Filipina pada tahun 2011, yaitu ketika Filipina merubah nama laut tersebut menjadi Laut Filipina Barat.⁷

Pada tanggal 2 Agustus 2019, Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia juga menyebutkan bahwa memang penyelesaian ketegangan isu Laut China Selatan ini berjalan relatif lamban, dengan artian dua tahun terakhir tidak ada ditemukannya konflik yang berujung pada kekerasan, melainkan banyak kemajuan yang tercapai. Indonesia sendiri disebutkan akan tetap mengambil peran agar mampu mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar, sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono bahwa investasi di lokasi tersebut semakin banyak, sehingga

membuktikan diperlukannya penyelesaian konflik atau pada hal ini dapat disebut sebagai upaya manajemen kasus supaya tidak ada konflik, bukan sebaliknya fokus pada idealisme untuk segera menyelesaikan suatu kasus.⁸

Namun, berdasarkan dari sejumlah catatan gemilang China ini, nyatanya China juga tengah mengalami konflik, yaitu pembantaian suku Uighur di provinsi Xinjiang, China.

Xinjiang pada dasarnya merupakan sebuah daerah otonomi khusus etnis Uighur di China, wilayah ini berbatasan langsung dengan Rusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Mongolia, Afghanistan, hingga dua wilayah terawan di India, yakni Kashmir dan Jammu. Secara singkat, dapat disebut bahwa Xinjiang adalah gerbang masuk sekaligus gerbang keluar utama dari Eurasia menuju Daratan China, serta langkah yang hebat guna mendukung realisasi konsep OBOR China (*One Belt One Road*).⁹ Selain itu, wilayah yang menyabet predikat sebagai produsen minyak signifikan di China ini juga "dikejar" cukup banyak masalah, dimulai dari penemuan 54 mineral langka di dalamnya, serta adanya corong minyak yang diperkirakan mencapai 21 milyar ton, telah diterkam radar CIA sejak 1987.¹⁰

Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian saat jumpa pers bersama

⁶ Suara.com, *Antisipasi Konflik Laut Cina Selatan, AL dAn AU Diminta Sinergi*, <https://amp.suara.com/news/2017/05/14/145832/antisipasi-konflik-laut-cina-selatan-al-dan-au-diminta-sinergi> Diakses pada 26 November 2019 pukul 21.28 WIB

⁷ Suara.com, *Cina Berang Indonesia Ganti Laut Cina Selatan Jadi Natuna Utara*, <https://amp.suara.com/news/2017/07/17/212253/cina-berang-indonesia-ganti-laut-cina-selatan-jadi-natuna-utara> Diakses pada 26 November 2019 pukul 21.20 WIB

⁸ Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, *BPPK: Indonesia Tetap Ambil Peran di Laut Cina Selatan*, <http://setnas-asean.id/news/read/bppk-indonesia-tetap-ambil-peran-di-laut-cina-selatan> Diakses pada 26 November 2019 pukul 20.40 WIB

⁹ E-International Relations, *The Changing Security Dimension of China's Relations with Xinjiang*, <https://www.e-ir.info/2019/03/31/the-changing-security-dimension-of-Chinas-relations-with-xinjiang/> Diakses pada 21 April 2019 pukul 14.25 WIB

¹⁰ The New York Times, *China Invest in Region Rich Oil, Coal, and Also Strife*, <https://www.nytimes.com/2014/12/21/world/asia/China-invest-in-xinjiang-region-rich-in-oil-coal-and-also-strife.html>, Diakses pada 21 April 2019 pukul 15.20 WIB

pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah, ia menuturkan, bahwa dari total 23 juta muslim China terdapat sekitar 14 juta muslim yang menjadi mayoritas dan mendiami provinsi otonomi Xinjiang di China. Mereka berasal dari 10 suku yang berbeda, dan mayoritasnya ialah suku Uighur.¹¹

Suku Uighur yang menjadi mayoritas muslim dan menghuni provinsi Xinjiang ini disebutkan menjadi alasan tersendiri bagi China untuk mengambil langkah yang serius, terutama setelah Uighur pernah mendeklarasikan wilayahnya untuk terlepas dari China, dan mengakui sebagai bagian dari Turkestan Timur (ide Pan-Turkisme atau nasionalisme Uighur; tidak bagian dari China). Padahal, di tahun 1940-an pemimpin mereka telah mengakui bersatunya wilayah tersebut dan sepakat mengakui China sebagai pemimpin mereka.¹²

Hal yang membuat konflik Uighur di Xinjiang ini menjadi viral di media sosial ialah karena disebutkan telah terjadi pembantaian muslim Uighur yang dilakukan oleh pemerintah China. Hal itu terjadi sejak munculnya video keprihatinan yang digawangi oleh aktivis Uighur di Amerika Serikat, hingga berlanjutnya demonstrasi yang mengutuki kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan China terhadap Uighur.¹³ Namun dari situasi ini, sikap wakil

pemerintah Indonesia justru hanya turut menyampaikan keprihatinannya kepada Duta Besar China di Jakarta, yaitu: "Tentu saja, kami menolak atau ingin mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan pada urusan dalam negeri negara lain." ujar Jusuf Kalla.¹⁴ Lebih lanjut, karya ilmiah ini akan menjelaskan perihal alasan pemerintah Indonesia yang bersikap akomodatif di hadapan China, terutama dalam menyikapi kasus suku Uighur ini.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Behavioralis

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif behaviorisme. Richard C. Snyder menyatakan bahwa pusat perhatian dari penelitian Hubungan Internasional adalah tindakan-tindakan (*actions*), tindakan balas (*reactions*), dan tindakan timbal balik (*interactions*) dari negara-negara. Perspektif ini menjelaskan bahwa negara adalah pembuat kebijakan (*decision makers*), artinya yang dimaksudkan sebagai negara dalam pandangan behavioralis adalah sekelompok orang yang bertanggungjawab membuat keputusan di negara tersebut; tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh pihak yang bertindak atas nama negara (pembuat kebijakan); dan untuk memahami perilaku negara para teoritis harus memetakan kembali dunia sesuai pandangan para pengambil kebijakan.¹⁵

¹¹ CNN Indonesia, Riva Dessthanian Suastha, *Dubes China Sebut Pemberitaan Soal Uighur Sesat*, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/201812281228163043-106-357082/dubes-China-sebut-pemberitaan-soal-uighur-sesat>, Diakses pada 16 April 2019 pukul 15.43 WIB

¹² CNN Indonesia, Riva Dessthanian Suastha, *ISIS Uighur: Darah Bakal Mengalir di Sungai China*, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170303130505-113-197586/isis-uighur-darah-bakal-mengalir-di-sungai-China>, Diakses pada 16 April 2019 pukul 15.43 WIB

¹³ Gita Karisma, *Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah*, Jurnal Sosiologi, Volume 19, No. 1, hal. 44, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.lppm.unila.ac.id/6158/1/364->

712-1-PB.pdf&ved=2ahUKEwjHurGMrsjIAhXBNY8KHUCiBOgQFjADegQICRAB&usg=AOvVaw101yFBW9pn3tyulZ3fxHsS, Diakses pada 1 November 2019 pukul 13.15 WIB

¹⁴ Tempo.co, *Mengapa Pemerintah Negara Muslim, Termasuk Indonesia Diam Soal Uyghur?*, <https://www.tempo.co/abc/3377/mengapa-pemerintah-negara-muslim-termasuk-indonesia-diam-soal-uyghur>, Diakses pada 9 Mei 2019 pukul 13.20 WIB

¹⁵ Muhammad Saeri, *Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Universitas Riau: Jurnal Transnasional Vol. 3, No. 2, 2012, hal. 12-13.

Berdasarkan penggunaan perspektif behavioralis ini, ditemukan gagasan bahwa sikap Indonesia yang belum meningkatkan tindakannya atau yang hingga saat ini hanya berada pada tahap pemanggilan Duta Besar sebagai upaya konsultasi — dalam kasus pembantaian suku Uighur di Xinjiang, China — maka, ini merupakan sebuah bentuk pemikiran yang dirumuskan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, terutama untuk menjaga nilai harmonisasi. Adapun kebijakan politik luar negeri yang dirumuskan atau diputuskan oleh pemerintah Indonesia juga menjadi jalan dan harapan pemerintah untuk tetap dapat membuka keran kerjasamanya dengan China, guna mempertahankan kepentingan nasional Indonesia di berbagai proyek kerjasama, perdagangan, dan investasi

b. Tingkat Analisis: Kelompok

Tingkat analisis kelompok berasumsi, bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Menurut Margaret Hermann dan Charles Hermann dalam buku *The New Foreign Policy: Power Seeking In A Globalized Era* oleh Laura Neack mengatakan bahwa faktor domestik maupun faktor internasional dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara, yang mana pengaruh-pengaruh ini akan disalurkan melalui struktur politik pemerintahan, yaitu mereka yang melakukan upaya identifikasi, membuat keputusan, maupun yang mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri tersebut. Di dalam struktur inilah seperangkat otoritas pemerintah tersebut menggunakan kemampuannya dengan tujuan untuk mengkoordinir sumber daya maupun masyarakat, mereka disebut sebagai *ultimate decision unit*.¹⁶

Berdasarkan definisi dari analisis kelompok yang digunakan pada penelitian

¹⁶ Laura Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*, Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher, 2008, hal 66

ini, penulis memperoleh gagasan, bahwa situasi yang dipilih Indonesia untuk tidak meningkatkan tindakannya dalam kasus pembantaian suku Ughur di Xinjiang, China, merupakan sebuah situasi atau keputusan strategis yang dicetuskan sebagai salah satu bentuk kebijakan politik luar negeri Indonesia, yang mana hal ini turut didasarkan pada pertimbangan suatu kelompok yang berada di tubuh pemerintahan atau yang disebut sebagai *ultimate decision unit*. Kelompok ini yang turut mengusulkan kebijakan dan membuat keputusan, yaitu dengan turut menimbang *power* atau kapabilitas yang Indonesia miliki, maupun kepentingan dalam negeri yang harus dikaji jika berhadapan dengan China.

c. Teori Kebijakan Luar Negeri Adaptif-Strategik

Politik luar negeri merupakan salah satu kajian studi Hubungan Internasional yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek eksternal, namun juga aspek internal suatu negara.¹⁷ Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat model strategik, yang menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat ditekankan pada transaksi atau interaksi antar pihak-pihak yang terlibat, dibandingkan hanya dari sudut pandang pihak yang memberi tanggapan saja.¹⁸

Richard Snider juga pernah mengajukan prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks.¹⁹ Asumsi ini menyebutkan bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai

¹⁷ James, N. Rosenau, dkk, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hal 15

¹⁸ Lloyd Jensen, *Explaining Foreign Policy*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982, hal 6

¹⁹ Snyder, dkk dalam Rosenau, James N, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969, hal. 199-205

sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.²⁰ Teori ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks²¹, dengan prosedur-prosedur kelembagaannya.²²

Adapun untuk bentuk politik luar negeri adaptif, Rosenau turut menyatakan bahwa bentuk politik luar negeri ini merupakan suatu mekanisme agar negara dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Maka dari itu, upaya untuk bertahan hidup guna mencapai tujuan nasional harus dapat diseimbangkan, baik dari sisi tekanan internal maupun tekanan eksternal, dimana proses ini tentunya memiliki risiko, bahkan dapat memicu munculnya disintegrasi.²³

Berdasarkan hadirnya teori kebijakan luar negeri ini strategik-adaptif ini, maka posisi dan sikap Indonesia yang tidak meningkatkan aksi atau melanjutkan tindakannya — hanya berada di level pemanggilan Duta Besar sebagai upaya konsultasi — dapat diidentifikasi sebagai bentuk dan upaya Indonesia dalam beradaptasi di situasi global, baik disebabkan oleh prinsip diplomasi Indonesia yang menghindari sikap konfrontatif, maupun demi menghindari kemungkinan terjadinya gangguan dalam hubungan

bilateral Indonesia dengan China, sebab, upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan pembangunan nasional, serta mengembangkan akses pasar sebagai tujuan peningkatan usaha ekspor-impor, investasi, maupun kerjasama keuangan dan teknik, yang mana hal tersebut ditujukan untuk menunjang pembangunan dan pemulihan ekonomi dalam negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekosopol di Xinjiang dan Sejarah Singkat Hubungan RI-China

Xinjiang merupakan provinsi di China yang sangat memegang nilai strategis maupun ekonomisnya. Hal ini dikarenakan Xinjiang merupakan wilayah yang kaya akan ladang minyak, hingga karena itu China tidak ingin melepaskan Xinjiang. Xinjiang merupakan daerah otonomi khusus yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Mongolia, Afghanistan, hingga dua wilayah terawan di India, yakni Kashmir dan Jammu.²⁴

Adapun Xinjiang yang turut memiliki nilai strategis juga menjadi daya tawar bagi China untuk tidak melepaskannya, sebab Xinjiang dapat menjadi *buffer zone* atau wilayah penyangga bagi China. Bahkan, Xinjiang ini kerap dikaitkan dengan kepentingan China di Asia Tengah, yaitu jika Xinjiang mengalami ketidakstabilan maka tentu hal tersebut akan mengganggu kepentingan nasional China, terutama dengan rentannya peningkatan kasus *illegal trafficking* seperti penyelundupan senjata, maupun *human*

²⁰ Lloyd Jensen, *loc cit*, hal.7

²¹ Alison Graham T, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, Boston: Little Brown, 1971

²² Anderson Paul A., *What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision?*

The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy, 1987, dalam Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., dkk, *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston: Unwin, hal. 285-308

²³ James N. Rosenau, *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*, New York: Nichols Publishing, 1981, hal 59

²⁴ E-International Relations, *The Changing Security Dimension of China's Relations with Xinjiang*, <https://www.e-ir.info/2019/03/31/the-changing-security-dimension-of-Chinas-relations-with-xinjiang/> Diakses pada 21 April 2019 pukul 14.25 WIB

trafficking yang baik itu masuk ataupun yang akan keluar dari Asia Tengah.²⁵

Gambar 1. Peta Wilayah Otonomi Xinjiang di China



Sumber Gambar: www.eastwestcenter.org dalam Dwyer, A. M. *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse*. Policy Studies, 2005, (15), I

China juga merupakan negara dengan jumlah etnis yang beragam. Ada 56 etnis yang diakui di China, dan yang terbesar ialah etnis Han. Adapun berdasarkan sensus pada tahun 2010 ditetapkan bahwa etnis Uighur hanya berjumlah $\pm 8.399.393$, yaitu terdiri dari keturunan China, Kazakhstan (berjumlah 223.100 pada tahun 2009), serta

Kyrgyztan (berjumlah 49.000 pada tahun 2009).²⁶

Etnis Uighur sendiri berasal dari etnis Proto-Turki yang mendiami daerah otonomi Xinjiang di bagian Asia Tengah, serta memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan agama. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan mereka yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga hal tersebut dapat menciptakan timbulnya rasa primordialisme yang kuat di antara bangsa Turki, meski demikian mereka telah terpecah menjadi beberapa negara berdaulat.²⁷

Di China, perbedaan yang muncul antara suku Han sebagai mayoritas dan suku Uighur juga mengalami perlakuan yang sangat mencolok. Hal tersebut turut menjadi dasar dan latar belakang bagi timbulnya kerusuhan yang terjadi pada suku Uighur, bahkan hal ini sudah dimulai ketika Xinjiang menjadi wilayah yang berada di bawah kuasa China, terutama ketika masa pemerintahan Mao Zedong berakhir hingga periode ketika dimulainya sistem pemerintahan Deng Xiaoping.²⁸

Salah satu dari beragam kerusuhan tersebut ialah kerusuhan atau demonstrasi yang pernah dilakukan mahasiswa di Universitas Urumqi. Demonstrasi mahasiswa ini ditujukan sebagai bentuk protes mereka kepada pemerintah China yang dianggap telah merepresi kebudayaan suku Uighur. Tidak hanya demonstrasi tersebut, sebab, di sepanjang tahun 1990-an juga muncul beragam tensi lainnya di China.²⁹

Pasca meninggalnya Mao Zedong, hingga berubahnya sistem politik nasional

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Siti Nida Laylia, *Respon Turki Terhadap Pelanggaran HAM Minoritas Muslim Uighur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok 2009-2010*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP (JOM), Vol. 5 No. 1, April 2018, hal 2

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

²⁵ Gita Karisma, Jurnal Sosiologi, Vol. 19, *loc.cit.*

China di bawah Deng Xiaoping, Xinjiang semakin menuai kekacauan. Seperti demonstrasi yang terjadi di Universitas Urumqi pada tahun 1988 dan 1989. Tidak cukup dari keadaan tersebut di atas, pemerintah China juga telah merubah tatanan kota Kashgar atau dalam bahasa halusnya mereka menyebut ingin memodernisasi kota ini, yang merupakan sebuah pusat kebudayaan terbesar bagi suku Uighur.

Berdasarkan dari keadaan di atas, membuat etnis Uighur berjuang dan senantiasa berusaha mewujudkan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan tersebut, bahkan karena hal tersebut membuat mereka yakin untuk membentuk organisasi nasional bagi Uighur, yaitu yang kemudian diberi nama *East Turkistan National Center*, didirikan pada tahun 1998 di Turki. Hal itu yang kemudian pada tahun 2000 membuat pemerintah China menuduh, bahwa etnis Uighur berencana memerdekakan diri dari wilayah kekuasaan nasional China, sehingga pemerintah China menghimbau kepada seluruh negara di dunia untuk tidak memberikan dukungan maupun simpati kepada mereka.

Tidak hanya hal itu saja yang dilakukan China, sebab, beberapa waktu kemudian China turut mendukung kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu ketekunan mereka dalam propaganda *war on terrorism*-nya, atau perang melawan terorisme. Sehingga sejak waktu tersebut, kebijakan China terhadap pergerakan nasionalisme Uighur semakin tinggi dan ketat.

Pada tanggal 15 Desember 2003, Xinhua News yang merupakan platform media nasional komunis China menerbitkan berita yang mengutarakan bahwa Menteri Keamanan Publik China pada saat itu telah menemukan dan merilis daftar nama organisasi maupun individu yang terlibat dalam kasus terorisme transnasional, termasuk mereka yang tergabung di dalam *East Turkestan*. Tidak hanya daftar organisasi maupun individu yang tercantum pada berita Xinhua kala itu, melainkan juga

disebutkan apa saja kegiatan yang telah mereka lakukan, seperti halnya jaringan kelompok nasionalisme seperti ETIM yang dituduh sebagai kelompok terorisme dan telah melakukan berbagai tindak kekerasan. Bahkan tidak hanya ETIM saja, melainkan juga: ETLO, WUYC, maupun ETIC, beserta nama-nama individu seperti: Atahan Abuduhani, Hasan Mahsum, Muhanmetemin Hazret, Dolqun Isa, Abduljeli Kalakahs, Abudukadir Yapaquan, Abdumujit Muhammadkelim, Abudula Kariaji, Abulimit Turxun, Hudaberdi Haxerbik, dan Yasen Muhammad.³⁰

Kebijakan pemerintah China yang keras ini juga pernah menyinggung Turki, sebagai negara yang hingga sekarang masih sering melancarkan dukungannya bagi rakyat Uighur. Bahkan, pada tahun 2018 dan 2019 lalu dimana China mengecam dan memperingatkan presiden Erdogan untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya, sebab Xi Jinping menambahkan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi relasi Beijing dan Ankara.

Tampaknya benar, bahwa pemerintah China yang di satu sisi tidak ingin kehilangan wilayah Xinjiang yang strategis dan bernilai ini membuat China melancarkan pembenaran aksinya ke berbagai sudut, sebab, bagi keamanan domestik sendiri, China juga secara periodik dan berturut-turut masih berusaha melancarkan kepentingannya, yaitu dari upaya diterbitkannya berbagai *white papers, reports*, bahkan penekanan bagi media nasionalis China seperti Xinhua News yang gencar mempublikasikan berbagai dalih pemerintah China.

Hal itu yang kemudian turut menyeret negara kecil di sesama kawasan Asia ini, yaitu Indonesia, untuk turut bersikap diplomatis, yaitu dalam artian mencoba berdamai bersama China. Bahkan, pemerintah Indonesia juga tidak segan dalam mengumumkan bahwa sikap negaranya ini

³⁰ J. Todd Reed dan Diana Raschke, *The ETIM China's Islamic Militants and The Global Terrorist Threat*, California: Praeger Publisher, 2010

sama sekali tidak berhubungan dengan ketakutan akan terganggunya hubungan bilateral dan investasi bersama China. Namun nyatanya, berdasarkan penelitian yang ditemukan, pemerintah kedua negara justru semakin mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama maupun persahabatannya.

Alasan Pemerintah Indonesia Tidak Meningkatkan Tindakannya Dalam Kasus Suku Uighur

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) pada periode Agustus 2019, disebutkan bahwa ULN (Utang Luar Negeri) menurut pemberi kredit yang berasal dari China berjumlah sebesar US\$ 16,99 miliar atau setara dengan Rp 239,55 triliun (dengan kurs Rp 14.100). Hal demikian ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu ketika utang luar negeri Indonesia yang dihitung berdasarkan pemberi kredit dari China hanya berjumlah Rp 238,71 triliun.³¹ Berdasarkan hal ini dapat dicermati bahwa China semakin merambah ruang besar untuk menjadi kreditur di Indonesia, yang tidak lain dari hal tersebut China berupaya agar beragam kerjasama dapat lahir dari bantuan kredit atau pinjaman tersebut.

Lebih lanjut mengenai hal ini, diketahui dari data SULNI bahwa posisi ULN dari China nyatanya justru hanya menduduki posisi keempat, dengan posisi pertama lebih dulu ditempati oleh utang luar negeri dari Singapura dengan angkanya mencapai US\$ 66,46 miliar, disusul Jepang US\$ 29,36, serta Amerika Serikat sebesar US\$ 22,54 miliar. Lebih lanjut juga dicantumkan dalam data SULNI tersebut bahwa total ULN Indonesia pada akhir Agustus 2019 sebesar US\$ 393,5 miliar atau sebesar Rp 5.548,35 triliun, yang mana hal

ini merupakan jumlah utang dari kombinasi swasta dan pemerintah. Dan angka ini nyatanya tumbuh 8,7% secara tahunan atau lebih lambat dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang berjumlah 10,9%.³² Hal ini tentunya dapat menjadi poin yang kontras sehingga tidak dapat ditetapkan secara menyeluruh bahwa utang luar negeri Indonesia hanya bersumber dari China saja atau yang paling besar bersumber dari China, menimbang China sendiri berada pada posisi keempat yaitu di bawah Singapura, Jepang, dan Amerika. Meski begitu, tampaknya kenaikan atau meningkatnya nilai pinjaman yang diberikan kreditur China menjadi ide utamanya, sehingga membuat China dapat dikategorikan sebagai pemberi pinjaman yang dapat diandalkan oleh Indonesia.

Pada awal tahun 2020 ini, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Yasonna H. Laoly juga menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar China untuk Indonesia H.E. Mr Xiao Qian dan rombongan. Pada pertemuan tersebut, kedua negara telah membicarakan hubungan bilateral antara China dan Indonesia beberapa tahun ke belakang ini, serta harapan yang baru di tahun 2020.³³ Hal ini menunjukkan bahwa antara Indonesia dan China mempunyai komitmen untuk mempererat hubungan mereka, yang mana dapat ditandai dengan evaluasi-evaluasi di masa lalu, serta hal tersebut juga menjadi *flashback* agar di masa depan dapat mendorong pelaksanaan hubungan bilateral yang lebih baik.

Tidak hanya hal di atas saja, pembicaraan kedua negara juga meluas pada

³² *Ibid.*

³³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, *Awali Tahun 2020, Duta Besar China untuk Indonesia Kunjungi Menkumham Bahas Kerjasama Bilateral*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/awali-tahun-2020-duta-besar-china-untuk-indonesia-kunjungi-menkumham-bahas-kerja-sama-bilateral> Diakses pada 9 April 2020 pukul 03.45 WIB

³¹ Detik, *Daftar Lengkap Utang RI ke China*, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4752167/daftar-lengkap-utang-ri-ke-china> Diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 23.20 WIB

isu yang hangat dibicarakan tempo lalu, yang turut menjadi ide penulisan skripsi ini yakni tentang suku Uighur di China. Menkumham menyatakan pemerintah Indonesia berharap akan ada penyelesaian yang tepat dalam aspek universal hak azazi manusia di wilayah Xinjiang, namun meski begitu Menkumham juga menekankan bahwa Indonesia tidak bermaksud ingin atau akan mencampuri urusan dalam negeri China.³⁴ Berdasarkan hal ini dapat dimengerti bahwa bahasa atau gaya diplomasi yang dipakai oleh pemerintah khususnya Menkumham sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu membawa gagasan yang halus bahwa Indonesia tidak ingin membuat noda dalam lembar persahabatannya dengan China, sekalipun China tengah mengalami guncangan di dalam negerinya.

Berkenaan dengan keseluruhan data yang didapat pada bagian ini, dapat ditarik beberapa benang merah, bahwa hubungan Indonesia dan China semakin berpegangan erat, bahkan tidak peduli dalam kondisi di tengah pandemi yang tidak memiliki kepastian ini, China dan Indonesia justru semakin gencar berjanji untuk saling mendukung dan meningkatkan aktivitas perdagangan di berbagai bidang.

Adapun untuk bidang yang tergabung dalam proyek kemitraan strategis tersebut seperti industri, yaitu dimana kedua negara melakukan operasi industri gabungan dengan cara membangun fasilitas produksi Wuling Motors di Indonesia. Begitu juga dengan China yang semakin merambah proyek infrastruktur menyusul tingginya kebutuhan transportasi di Indonesia, seperti pembangunan taman dan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, kemitraan strategis di bidang wisatawan, China juga menjadi pemegang peran penting bagi meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga semakin ingin menjadikan China sebagai

³⁴ *loc. cit.*

negara tujuan beasiswa kedua terbesar bagi mahasiswa Indonesia.³⁵ Berdasarkan hal ini dapat dimengerti begitu luasnya bidang yang dirambah atas nama kerjasama kedua negara.

Tindakan Akomodatif Indonesia Terhadap China

Berkenaan dengan isu Uighur di Xinjiang ini, Menteri Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD menyebutkan telah berbicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia yaitu Xiao Qian. Xiao menyebutkan bahwa kasus etnis Uighur tersebut ialah kasus separatis karena mereka (Uighur) memiliki agenda di luar kerangka negara China. Adapun berdasarkan ungkapan Xiao Qian tersebut, maka Mahfud MD pun menjelaskan sebagai berikut:

”Dia menjelaskan di China itu kan banyak sekali orang Islam, di berbagai penjuru, *ndak* apa-apa. Kecuali Uighur katanya. Kenapa Uighur? Itu mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara, separatistlah kalau istilahnya.”³⁶

Adapun pada pertemuan tersebut selain untuk kepentingan diplomasi, Mahfud menyebutkan memang sengaja dilaksanakan untuk membahas tentang isu Uighur tersebut. Lebih lanjut, Mahfud juga turut meminta seluruh pihak untuk mempercayakan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi untuk mengatasi polemik Uighur ini. Sebab, sejauh ini Mahfud mengatakan bahwa Kemenlu telah mengedepankan diplomasi lunak terkait hal

³⁵ SindoNews, *Indonesia dan China Perkuat Kerjasama*, <https://internasional.sindonews.com/berita/1303673/40/indonesia-dan-china-perkuat-kerja-sama?showpage=all> Diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 01.14 WIB

³⁶ CNN Indonesia, *Mahfud Sebut Dubes China Jelaskan UIGHUR Sebagai Separatis*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191219201340-32-458505/mahfud-sebut-dubes-china-jelaskan-uighur-sebagai-separatis> Diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 02.14 WIB

tersebut. Mahfud juga menambahkan sebagai berikut: "Diplomasi kita itu diplomasi lunak aja. Kita tidak ikut mencampuri, kita melihatnya secara objektif."³⁷ Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah secara terang-terangan menyebutkan bahwa gaya diplomasi yang tepat yang harus dipakai Indonesia ketika berhadapan dengan China ialah diplomasi lunak. Hal tersebut mengingat bahwa selain Indonesia tidak memiliki kuasa terhadap hal-hal otoritatif yang terjadi dalam kawasan China, Indonesia terhadap China juga masih belum memiliki nilai yang seimbang untuk berada *power* yang kuat.

Di sisi yang bersamaan, Duta Besar China untuk RI Xiao Qian juga masih berada pada posisi yang sama, yaitu ia mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi suku Uighur di Xinjiang jika masih penasaran, sebab di sana tidak terdapat persekusi apalagi genosida seperti yang diberitakan. Xiao Qian turut menyampaikan hal itu ketika ia bertemu Kepala Staf Kepresidenan pada 17 Desember 2019 di Jakarta.³⁸

Lebih lanjut, Xiao juga menyebutkan bahwa ada persoalan di Xinjiang yang sedang ditangani oleh pemerintah China, persoalan ini sama dengan kondisi di dunia lain, yakni mereka tengah memerangi kasus radikalisme dan terorisme. Sementara itu, Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi persoalan Uighur ini sebagai urusan internal China. Moeldoko juga menambahkan, bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah di sejumlah negara memang kerap menghadapi masalah hoaks.³⁹ Berkenaan dengan data yang didapatkan di atas, dapat dijelaskan dan

dipahami bahwa isu pemanggilan Duta Besar China Xiao Qian oleh pemerintah RI beberapa tempo lalu tersebut menunjukkan sikap pemerintah Indonesia yang sudah tampak peduli terhadap kasus kemanusiaan yang menimpa suku Uighur di provinsi Xinjiang, China. Meski begitu, Indonesia belum memiliki nilai lebih untuk mampu melaksanakan tindakan diplomasi yang lebih tinggi selain berdiplomasi lunak dengan China. Hal ini sekali lagi disinyalir turut menyimpan kepentingan lain antara kedua negara, mengingat substansi poin sebelumnya yaitu pinjaman luar negeri, meningkatnya nilai perdagangan, serta investasi, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bukti bahwa China dan Indonesia bersama-sama berupaya merawat identitas persahabatannya, bahkan ingin memperluas kedekatan keduanya lagi sebagai saudara melalui perluasan di berbagai bidang kerjasama.

KESIMPULAN

Berdasarkan keadaan yang terjadi dalam polemik suku Uighur ini terdapat sejumlah poin penting yang didapat, yaitu pertama, dari penggunaan teori kebijakan luar negeri adaptif-strategik maka didapatkan hasil bahwa semakin rendah *power* yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar aksi diplomasinya dalam bertindak akomodatif. Bertindak akomodatif atau akomodasi di sini menunjukkan bahwa diplomasi yang dipakai Indonesia di hadapan China ialah diplomasi lunak, membuat Indonesia masih dapat bersikap halus sekalipun dalam menghadapi kasus pembantaian mengerikan di China.

Pada hal ini juga dapat dipahami bahwa diplomasi lunak ini ialah bentuk tindakan yang menjauhi tindakan konfrontatif. Sebab, tindakan konfrontatif atau konfrontasi sendiri dapat dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain apabila keduanya (negara) memiliki *power* dan kapabilitas internasional yang seimbang, sebaliknya jika tidak, salah satu yang memiliki *power* lebih kecil tersebut akan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Tirto.id, *Klarifikasi Dubes China Soal Uighur saat Bertemu Moeldoko*, <https://tirto.id/klarifikasi-dubes-china-soal-uighur-saat-bertemu-moeldoko-enDn> Diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 02.32 WIB

justru berbalik bertindak akomodatif sebagai upayanya mengakomodir kepentingan-kepentingan lain terhadap negara besar.

Lebih lanjut, pada polemik Uighur ini ditemukan pelajaran dan temuan ilmiah, bahwa kelompok religius di Indonesia mengeluarkan beragam tuntutan sebagai sikap turut berempati terhadap suku Uighur, sayangnya suara kelompok tersebut masih tidak cukup seimbang dibandingkan kekuatan dari kelompok nasionalis atau dalam hal ini kelompok yang dominan bekerja di level pemerintahan. Hal demikian dapat dilihat menjadi warna tersendiri dalam politik khas Indonesia, dimana kebijakan domestik dan keputusan politik luar negeri Indonesia masih didominasi oleh pemikiran, keputusan, dan tindakan dari kelompok elit pemerintah (nasionalis), yang dalam hal ini dipandang "cukup hemat" untuk menimbang suara-suara dari kelompok agama (religius), sehingga dapat dikatakan lebih akomodatif untuk merangkul dan menyesuaikan kepentingan dari berbagai pihak atau kekuatan. Hal demikian tentu tidak asing, dan cukup lumrah mengingat tumbuh kembang persahabatan, pinjaman, perdagangan, serta jaringan investasi yang ditanamkan pemerintah China khususnya dalam kasus ini di Indonesia, sehingga membuat pemerintah Indonesia bersikap akomodatif dan "tenggang rasa" terhadap China.

REFERENSI

Data Resmi Pemerintah:

China Government, *Full Text: Historical Matters Concerning Xinjiang*,
http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/21/content_WS5d33fed5c6d00d362f668a0a.htm
], Diakses pada 31 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB

Embassy of The People's Republic of China, *Full Text: Why Belt and Road and Global Maritime Fulcrum Cooperation Benefits*

both China and Indonesia?
<http://id.china-embassy.org/eng/sgdt/t1693736.htm>
Diakses pada 6 April 2020

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Awali Tahun 2020, Duta Besar China untuk Indonesia Kunjungi Menkumham Bahas Kerjasama Bilateral*,
<https://www.kemenkumham.go.id/berita/awali-tahun-2020-duta-besar-china-untuk-indonesia-kunjungi-menkumham-bahas-kerja-sama-bilateral> Diakses pada 7 April 2020

Kementerian Luar Negeri Indonesia: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia, *Eratnya Kemitraan Strategis RI-RRT dalam Pesona Wonderful Indonesia*,
<https://kemlu.go.id/beijing/id/news/2128/eratnya-kemitraan-strategis-ri-rrt-dalam-pesona-wonderful-indonesia> Diakses pada 26 November 2019 pukul 09.05 WIB

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Terobosan Kreatif dan Strategis Untuk Tingkatkan Ekspor Indonesia ke Tiongkok*,
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/494/berita/terobosan-kreatif-dan-strategis-untuk-tingkatkan-ekspor-indonesia-ke-tiongkok> Diakses pada 26 November 2019 pukul 09.06 WIB

Kementerian Perdagangan RI, *Enggartiasto Lukita Undang Investor Sarang Walet China*,
<https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/enggartiasto-lukita-undang-investor-sarang-walet-china-1>
Diakses pada 31 Agustus 2020 pukul 23.44 WIB

Kementerian Perdagangan, *Percepat Penetrasi Buah Tropis ke*

- Tiongkok, Kemendag Gelar Bussiness Matching Virtual Buah Naga, <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/percepat-penetrasi-buah-tropis-ke-tiongkok-kemendag-gelar-bussiness-matching-virtual-buah-naga-1> Diakses pada 1 September 2020 pukul 00.12 WIB
- Sekretariat Nasional ASEAN–Indonesia, BPPK: *Indonesia Tetap Ambil Peran di Laut Cina Selatan*, <http://setnas-asean.id/news/read/bppk-indonesia-tetap-ambil-peran-di-laut-cina-selatan> Diakses pada 26 November 2019 pukul 20.40 WIB
- Buku:**
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Hukum Nasional Ektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju), hal 215 dalam Kamsi, *Paradigma Politik Islam*
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Faisal, Ahmad, *Rekonstruksi Syari`at Islam (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Pegakkan Syari`at Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga), dalam Kamsi, *Paradigma Politik Islam*
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format–format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Graham , Alison T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, Boston: Little Brown
- Hefner, Robert W. 2005. *Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, and Democratitation*. Princeton dan Oxford: Princeton University Press
- Jensen, Lloyd. 1982. *Explaining Foreign Policy*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan
- Lovel, John. P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt: Rinehart and Winston, Inc
- Ma`arif, Ahmad Syafi`i. 1985. *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*. Yogyakarta: Dua Dimensi
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metedologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- MD, Moh. Mahfud, *Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama*, dalam Khamami Zada-Idy Muzayyad (ed.). 1999. *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Pustaka Pelajar
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*, Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher
- Paul, A. Anderson. 1987. *What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision? The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy* dalam Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., dkk, *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston: Unwin
- Rahman, Anwar. 2005. *Sinicization Beyond The Great Wall: China's Xinjiang Uighur Autonomous Region*. Leicester: Troubador Publishing Ltd

Robinson, James A. dan Richard C. Snyder, *Decision-Making in International Politics*, dalam Herbert C. Kelman, 1965. ed., *International Behaviour: A Social-Psychological Analysis*. New York, Holt: Rinehart and Winston

Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press

Rosenau, James, N., dkk. 1976. *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press

Rosenau, James N. 1981. *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*, New York: Nichols Publishing

Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, *Introduction The State and Shari`a in Perspective of Indonesian Legal Politics.*, hal 10

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Vol.2

Steans, Jill. 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, Edisi ke-2. Pearson & Longman

Subagyo, Agus. 2019. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Cimahi: HI FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani

Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pers

Todd, Reed, J. dan Diana Raschke. 2010. *The ETIM China's Islamic Militants and The Global Terrorist Threat*. California: Praeger Publisher

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Jurnal:

Hidayat, Muhammad Nizar. Jurnal Interdependence Hubungan Internasional. 2013. *Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang, China*. Vol. 1, No. 3, hal. 173, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/download/1327/1012&ved=2ahUKEWji5tu4rMjIAhXFrI8KHQGGb5EQFjAEegQIBRAB&usg=AOvVaw0y6R_hRhz-cZuYmOikiTUW

Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: In Right, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2012), Vol. 2, No. 1

Karisma, Gita. Jurnal Sosiologi. *Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah*. Volume 19, No. 1, hal. 44, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.lppm.unila.ac.id/6158/1/364-712-1-PB.pdf&ved=2ahUKEWjHurGMrsjIAhXBNY8KHUCiBOgQFjAdegQICRAB&usg=AOvVaw101yFBW9pn3tyulZ3fxHsS>, Diakses pada 1 November 2019 pukul 13.15 WIB

Laylia, Siti Nida. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau. 2018. *Respon Turki Terhadap Pelanggaran HAM Minoritas Muslim Uighur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok 2009–2010*. Volume 5 No.1 <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/17474/16878>

Mackerras, 1994, dalam Muhammad Nizar Hidayat, *Diaspora Uighur dan Hak Sipil di Xinjiang, China*,

- Jurnal Interdependence Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 3 September–Desember 2013, hal 165
- Rudiana, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Islam Sebuah Sistem Kehidupan Bernegara*, COSMOGOV, Vol.1, No. 1, 2015 hal 191
- Rosenau, James N, *Foreign Policy as Adaptive Behaviour: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model*, Jurnal Comparative Politics, vol. 2, No. 3, 1970
- Saeri, Muhammad. 2012. *Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik*. Universitas Riau: Jurnal Transnasional Vol. 3, No. 2
- Singer, J.D. 1961. *World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations, Theoretical Essay*. Volume 14, No. 1
- Zaidan, Muhammad Ali. 2017. *Jurnal Seminar Nasional Hukum. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*. Semarang: Universitas Semarang. Vol. 3. No. 1. hal 158
- Website:**
- Aljazeera.com, *China Says 13.000 'Terrorist' Arrested in Xinjiang Since 2014*, <https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2019/03/China-1300-terrorist-arrested-xinjiang-2014-190318045455341.html>, Diakses pada 21 April 2019 pukul 14.10 WIB
- Amnesty International, *Amnesty International; People's Republic of China: Gross Violations of Human Rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region*; 21 April 1999, 1999, <http://www.uyghurcongress.org/en/wpcontent/uploads/31-March-1999-Amnesty-International.pdf>
- Amnesty International, *China: "Justice, Justice"; The July 2009 Protest In Xinjiang, China*, 2009, <http://www.uyghurcongress.org/en/wpcontent/uploads/AI-Report-2-July-2010.pdf>
- AntaraNews, *ITPC Pertama di China Diresmikan*, <https://m.antaranews.com/amp/berita/969362/itpc-pertama-di-china-diresmikan> Diakses pada 30 September 2020 pukul 00.20 WIB
- AntaraneWS, *Utang Luar Negeri Indonesia 404,7 Miliar Dolar AS pada Mei 2020*, <https://m.antaranews.com/berita/1616506/utang-luar-negeri-indonesia-4047-miliar-dolar-as-pada-mei-2020> Diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB
- BBC News Indonesia. *Muslim Uighur di Xinjiang: Indonesia Harus Desak China Agar Buka Akses Informasi*. <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-46637762> Diakses pada 8 Oktober 09 pukul 22.15 WIB
- BBC News, *Massa Demo Kedubes Cina, Tuntut hentikan Persekusi Muslim Uighur*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46643055.amp> Diakses pada 26 Juli 2020 pukul 01.15 WIB
- Cambridge Dictionary. *The Meaning of Separatism*. <https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/separatism>, Diakses pada 21 April 2019 pukul 19.58 WIB